

Tatkala Pasar Memasuki Berbagai Kehidupan

Ketika disebut istilah pasar, maka yang terbayang di benak kita adalah tempat di mana terjadi aktivitas jual beli barang atau jasa. Pembeli dan penjual saling bertransaksi untuk menyepakati berapa harga barang yang akan dijual atau dibeli. Di pasar, pemilik barang menginginkan barangnya dibeli dengan harga yang setinggi-tingginya oleh pembeli. Demikian pula pembeli, ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Setelah terjadi tawar-menawar, maka harga disepakati dan kemudian terjadilah transaksi antara penjual dan pembeli. Pada umumnya kedua belah pihak, sebelum terjadi kesepakatan harga, saling bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan harga. Terjadi di sana, kadang saling ketidaksepahaman tentang harga, penjual mengunggulkan barang yang mau dijual dengan menyebutkan berbagai kelebihan, dan pembeli sebaliknya merendahnya. Kejadian seperti itu biasa terjadi dalam proses jual beli, tidak ada pihak-pihak yang harus merasa tersinggung. Namun setelah terjadi transaksi, baik penjual dan pembeli tidak ada ikatan kepentingan apa-apa lagi. Jarang terjadi komunikasi antar penjual dan pembeli berlanjut menjadi hubungan kekeluargaan yang panjang, kecuali hal tertentu saja yang keduanya saling memiliki kepentingan lebih lanjut. Hubungan baik di antara keduanya terjadi tatkala saling bertransaksi, dan setelah itu ikatan itu hilang begitu saja. Pembeli sudah mendapatkan barang sedang penjual sudah mendapatkan uang, maka hubungan itu putus.

Di era modern seperti sekarang ini, seiring dengan perubahan zaman, nuansa jual beli terjadi tidak saja di pasar, melainkan merasuk ke hampir seluruh relung-relung kehidupan yang luas. Dahulu orang merasa risih berceramah di masjid mengkait-kaitkan dengan uang. Ceramah ya ceramah. Ceramah adalah kegiatan sosial yang harus diwamai oleh suasana keikhlasan untuk mengabdikan pada Allah swt. Begitu pula, memimpin doa, belajar agama, khutbah dan sebagainya, dahulu tidak pernah diberi imbalan dengan uang. Kalaupun harus dibayar, biasanya semata-mata dimaksudkan sebagai pengganti biaya transport. Hubungan antar berbagai pihak dalam kegiatan semacam itu, tidak pernah terjadi transaksi. Semua kegiatan semacam itu dianggap ibadah, ialah untuk memenuhi kepentingan bersama. Tetapi rupanya, akhir-akhir ini, telah terjadi perubahan orientasi yang amat dahsyat. Misalnya, petugas khatib, imam masjid dan bahkan pembaca doapun kini ada tarifnya. Akibatnya, muncul sebutan masjid basah, masjid kering dan masjid setengah basah dan setengah kering. Artinya, pasar sudah merembet kemana-mana, termasuk ke tempat-tempat ibadah.

Jika di masjid atau di forum spiritual saja terjadi transaksi, maka apalagi di tempat-tempat selain itu, misalnya di birokrasi pemerintahan, kesehatan, politik, hukum, pendidikan dan lainnya. Akhir-akhir ini transaksi yang menyolok adalah di dunia politik. Seorang calon kepala daerah harus menyetor dana tertentu kepada partai yang mengusungnya. Belum lagi dana lain yang harus dikeluarkan, misalnya untuk kampanye, dan biaya lainnya yang tidak sedikit jumlahnya. Akibatnya baik yang menang dalam pencalonan maupun yang kalah, harus mengeluarkan dana yang tak terhitung besarnya. Begitu pula, para calon legislatif di berbagai tingkatan -----daerah atau pusat, tidak akan jadi, jika tidak di back up oleh dana besar. Maka setelah terpilih, pantaslah mereka berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan itu. Jalan pintasnya adalah korupsi. Karena itulah maka tidak sedikit pejabat, setelah mengakhiri masa jabatannya segera berurusan dengan KPK dan berlanjut mereka masuk penjara.

Transaksional juga masuk pada dunia pendidikan. Layanan pendidikan---khususnya pendidikan dasar dan menengah seharusnya bisa dinikmati oleh semua orang dan bahkan menjadi kebutuhan bersama. Akan tetapi ternyata masih menjadi lagu tahunan yang mesti disuarakan. Pendidikan masih dirasakan

sebagai barang mahal. Padahal, jika di komunitas tertentu, warganya tidak berpendidikan, maka resikonya akan dirasakan oleh semua warga yang bertempat tinggal di wilayah itu. Konsekuensi dari mahalnya biaya pendidikan rupanya belum dihayati. Buktinya, di kalangan masyarakat miskin, banyak anak tidak mampu sekolah. Lagi-lagi, di pendidikan pun terjadi transaksi, yaitu transaksi antara masyarakat dan sekolah. Calon murid diijinkan masuk sekolah manakala menyepakati harga dan begitu pula sebaliknya, tidak sekolah jika tidak mampu membayar. Dengan begitu, pasar telah memasuki relung-relung wilayah pendidikan. Kebutuhan dasar untuk bisa sekolah di tingkat dasar pun, telah terjadi transaksi.

Pendidikan agar berhasil maksimal, secara teoritik di antaranya harus dibangun hubungan guru dan murid yang bermuafakat kasih sayang, sebagaimana hubungan orang tua dan anak. Jika di sekolah sudah diwamai hubungan transaksional, maka sekolah tak ubahnya pasar. Guru sebagai penjual dan murid sebagai pembeli. Hubungan transaksional seperti ini persis bagaikan hubungan orang-orang di pasar. Pembeli akan mau membayar jika barang yang akan dibeli nyata-nyata sesuai dengan syarat yang disepakati. Demikian juga guru akan menerima murid manakala para murid melalui orang tua mereka mau membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Kepala Sekolah. Inilah yang disebut transaksi pendidikan, yang sesungguhnya tidak perlu terjadi jika pelayanan publik ditangani sepenuhnya oleh pemerintah.

Fenomena menarik yang mungkin perlu dipertimbangkan, yaitu apa yang menjadi kebijakan di negeri Iran atau Sudan. Kedua negeri tersebut sesungguhnya tidak terlalu kaya. Di Iran pendidikan dasar dan menengah oleh pemerintahnya dibebaskan dari biaya alias gratis. Bahkan untuk pendidikan kedokteran dan sastra Parsi para mahasiswa tidak boleh dipungut biaya. Sebab jika mahasiswa dipungut biaya, apalagi dengan tarif mahal, maka setelah lulus menjadi dokter, dikhawatirkan mereka akan memungut kembali uang yang telah dibayarkan ketika sekolah, justru dari pasien yang seharusnya mendapatkan pertolongan. Demikian juga jika pendidikan sastra Parsi dipungut biaya, tidak akan ada orang yang belajar bidang ini, dan dikhawatirkan kekayaan bangsa ini akan punah. Di Sudan juga demikian, Pendidikan Dasar dan Menengah dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Bahkan, beasiswa diperbanyak sampai di perguruan tinggi. Pemerintah Sudan mengambil kebijakan untuk mengembangkan pendidikan sebagai upaya mensejahterakan rakyatnya. Mereka yang bergelar sarjana dikirim ke berbagai negara untuk bekerja sebagai ilmuwan, mengajar di berbagai perguruan tinggi luar negeri. Karena itulah banyak orang Sudan menjadi pengajar, misalnya di Malaysia, Singapura, India dan bahkan juga di Amerika Serikat dan juga Eropa. Negeri Sudan agak aneh, warga negara yang pintar dikirim ke luar negeri, sedangkan yang kurang pintar disuruh kerja di negerinya sendiri. Sayang di Indonesia, rupanya masih memerlukan waktu untuk mengambil keputusan yang lebih strategis, yaitu menguntungkan bagi rakyat dan bangsa secara keseluruhan. Allohu a'lam.